



Judul : DPR Desak Kemendag Bayar utang Rafaksi
Tanggal : Selasa, 05 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

DPR Desak Kemendag Bayar Utang Rafaksi

ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menyelesaikan proses pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Menurutnya, persoalan itu tak bisa dianggap sepele, terlebih Aprindo telah berjasa dalam menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng saat terjadi kelangkaan pada 2022.

"Di tengah harga minyak goreng yang waktu itu tinggi, bahkan tidak ada di pasaran, pahlawannya itu Aprindo. Maka persoalan rafaksi ini harus segera diselesaikan," kata Mufti dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, kemarin.

Ia khawatir, berlarut-larutnya proses pembayaran utang rafaksi akan menyulut ketidakpercayaan pengusaha ritel kepada pemerintah.

"Jangan sampai ini tidak dibayar. Kalau suatu saat nanti tiba-tiba harga CPO naik, lalu harga minyak goreng ikut naik, mereka tidak mau lagi terlibat dalam urusan kebijakan dengan pemerintah," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri tak berkomentar apa-apa atas desakan dari wakil rakyat tersebut. Namun, awal Mei 2023 lalu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga optimistis pelunasan rafaksi minyak goreng senilai Rp344 miliar akan selesai sebelum Agustus 2023.

"Kemendag siap untuk berkomunikasi dan saya yakin akan ada titik temunya sebelum Agustus. Ini masih ada Mei, Juni, Juli, sebelum itu

bisa selesai," kata Jerry usai meninjau Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, Senin (8/5).

Ia menuturkan pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dengan Aprindo untuk mencari titik terang mengenai utang pemerintah kepada peritel itu dalam program pengadaan minyak goreng pada 2022.

"Jangan sampai ini tidak dibayar. Kalau suatu saat nanti tiba-tiba harga CPO naik, lalu harga minyak goreng ikut naik, mereka tidak mau lagi terlibat dalam urusan kebijakan dengan pemerintah."

Mufti Anam

Anggota Komisi VI DPR
Fraksi PDI Perjuangan

Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan jumlah pengusaha ritel yang belum dibayar mencapai 31 perusahaan. Akibat tidak adanya kepastian itu, Roy mengatakan pengusaha ritel telah sepakat akan memotong tagihan, mengurangi pembelian minyak goreng, menyetop pembelian minyak goreng dari produsen, dan akan menggugat melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). (Fik/Ant/E-2)